

Contraflow Kurangi Kemacetan 30%

JAKARTA – Polda Metro Jaya mengklaim penerapan sistem contraflow berhasil mengurangi kemacetan hingga 30% di jalan bebas hambatan.

Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadir Lantas) Polda Metro Jaya AKBP Sambodo Purnomo mengungkapkan, pihaknya menggelar uji coba *contraflow* di tiga ruas tol, yakni Serpong-Tomang, Cawang-Semanggi, dan Grogol-Slipi. "Hasil *contraflow* di tiga lokasi ini cukup efektif dan efisien mengurai kemacetan 30%," ungkap Sambodo kemarin.

Sambodo mencontohkan, di ruas tol Grogol-Slipi setiap jam bisanya dilewati 6.000 unit kendaraan. Ketika diberlakukan *contraflow*, terjadi pengurangan 2.000 unit kendaraan per jamnya. Sambodo menilai hal ini sangat efektif, sebab bila tidak ada *contraflow* pasti akan terjadi kepadatan di jalur tersebut.

Dia melanjutkan, kebijakan yang diberlakukan di jalan bebas hambatan tersebut tidak sembarang diberlakukan. Hal tersebut dilaksanakan setelah seluruh *stakeholder* melakukan pembahasan dan riset. Lokasi yang dipilih memang menjadi simpul-simpul kemacetan, sehingga bila dilaksanakan maka bisa mengurai kemacetan.

Meski mengklaim berhasil melakukan uji coba *contraflow* di tiga titik itu, Sambodo mengakui ada satu uji coba yang tidak berhasil mengurai kemacetan, yaitu jalur Cawang-Rawamangun. Di lokasi ini, pihaknya mengalami kendala, seperti jalur yang sempit dan tidak ada

nya bahu jalan seandainya ada situasi darurat.

Selain jalur yang sempit, lokasi jalan tol Cawang-Rawamangun juga tidak memberlakukan pembatasan untuk kendaraan besar seperti truk dan kontainer. "Makanya kami uji coba dulu, seandainya memang tidak berhasil maka sistemnya tidak dilaksanakan," ujarnya.



DOK. KORAN SINDO

AKBP SAMBODO
PURNOMO
Wadir Lantas
Polda Metro Jaya

Sambodo menuturkan, melihat keberhasilan *contraflow* di tiga lokasi ini menandakan untuk mengurus kemacetan di Jakarta tidak harus dilakukan dengan upaya makro yang membutuhkan waktu lama serta biaya mahal. Namun, mengurai kemacetan juga bisa dilakukan dengan langkah kecil serta biaya murah. Tidak hanya menunggu selesainya pendataan *electronic registration identification* (ERI) atau pengadaan unit bus Trans-

jakarta tambahan.

Walaupun dengan cara itu dapat mengurangi kemacetan Jakarta secara signifikan, Sambodo menyebutkan penanganan secara makro itu perlu waktu yang tidak sebentar dan dana yang tidak sedikit pula. Sambodo berpendapat penanganan secara mikro adalah penanganan cepat yang hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung, misalnya dengan pemberlakuan *contraflow*.

Selain *contraflow*, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya juga memikirkan kebijakan sistem satu arah (SSA) dan ruang henti khusus (RHK). Jalur-jalur yang memungkinkan penerapan SSA masih dikaji lebih lanjut oleh Ditlantas Polda Metro Jaya.

Sementara itu, RHK adalah ruang kosong dengan luas tertentu yang berada di depan garis batas lampu merah. "Nanti kami bakal buat garis merah di depan lampu merah untuk pengguna sepeda motor," tegasnya. RHK disiapkan khusus untuk motor dan nantinya mobil juga harus berhenti sebelum melewati garis RHK. Sistem ini bertujuan mengurangi masalah akibat motor yang sering menyelinap di antara mobil-mobil sehingga memperlambat laju kendaraan.

Penanganan lain secara mikro adalah memperbolehkan kendaraan memutar langsung tanpa mengikuti arus dan jalur putaran atau sistem kanalisasi. Kebijakan ini sudah dilakukan di Bundaran HI dan Bundaran Senayan. "Kita harus *thinking out of the box* untuk mengurangi macet di Jakarta," bebernya.

Pengamat transportasi Yoga Adiwinartha menuturkan, para pemangku kebijakan seperti gubernur dan kapolda Metro Jaya harus memiliki suatu terobosan yang ekstrem atau tidak populer untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Dia mengambil contoh tindakan seperti pembatasan kendaraan berat yang sebelumnya menjadi suatu kebijakan yang cukup tidak populer bisa dilakukan dan cukup berhasil. "Kebijakan itu awalnya memang ada penolakan, tapi akhirnya masyarakat yang menerimanya," tuturnya.

Para pemimpin diharapkan bisa memberikan solusi walaupun pada awalnya akan membuat mereka dicaci. Tetapi bila bisa mempertanggungjawabkan dan mampu, tentu masyarakat akan menerimanya.

Namun, pihaknya juga meminta kepada pemerintah bila memang ada kebijakan yang ekstrem maka diberikan solusi yang juga memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

Menurut Yoga, salah satu solusi yang paling tepat adalah menaikkan tarif parkir di gedung-gedung yang ada di Jakarta. Seperti yang diterapkan di Singapura dan London menerapkan tarif parkir yang cukup mahal, sehingga masyarakatnya juga jarang menggunakan kendaraan pribadi dan memilih angkutan umum untuk kendaraan sehari-hari.

"Kalau ini diterapkan di Jakarta, kebijakan ini diyakinkan lebih berhasil, tapi tentunya fasilitas lainnya harus bisa lebih ditingkatkan," tukasnya.

● helmi svarif